



**INDONESIA INDICATOR**

---

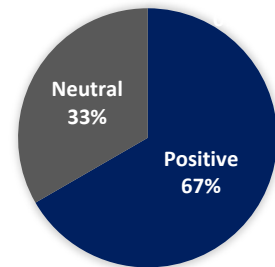
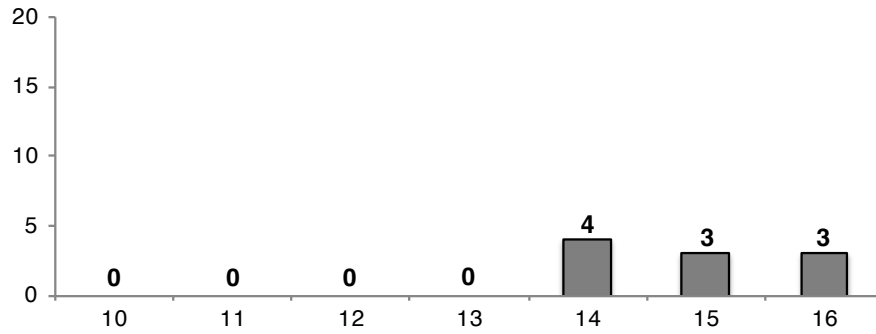
# **LAPORAN MEDIA CETAK**

**Wakil Gubernur Jawa Tengah  
(16 Mei 2025)**

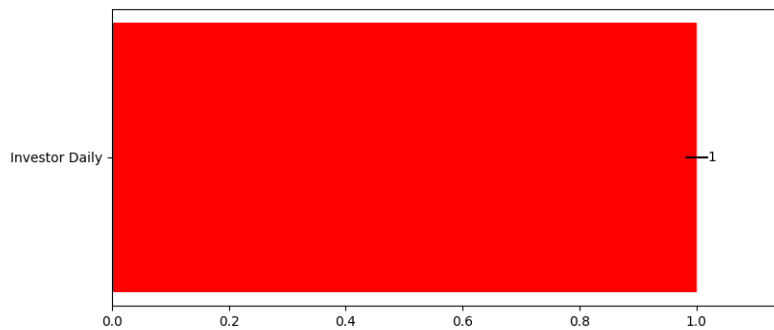
## Summary

| Media | News | Positive | Neutral | Negative |
|-------|------|----------|---------|----------|
| 3     | 3    | 2        | 1       | 0        |

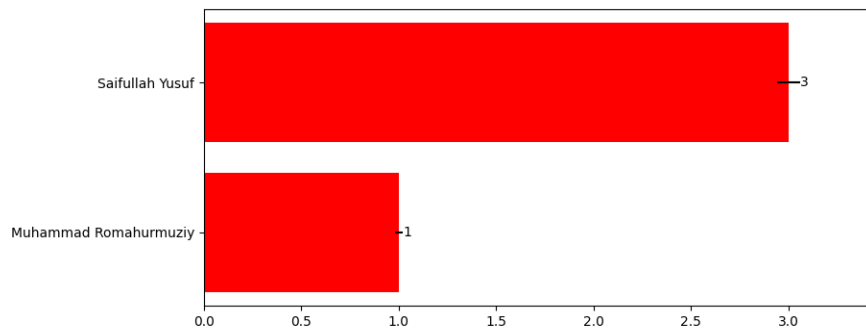
## Daily Statistic



## Media Share



## Influencers



## Table Of Contents : 16 Mei 2025

| No | Date        | Media          | News Title   | Page | Sentiment | Influencers                            |
|----|-------------|----------------|--|------|-----------|--|
| 1  | 16 Mei 2025 | Investor Daily | Mensos: Saya Tidak Ada Minat Jadi Ketum PPP                | 12   | Neutral   | Saifullah Yusuf, Muhammad Romahurmuziy |
| 2  | 16 Mei 2025 | Jateng Pos     | Wagub: Jawa Tengah Tidak Kirim Anak Nakal ke Barak Militer | 12   | Positive  |  |
| 3  | 16 Mei 2025 | Suara Merdeka  | Jateng Tidak Akan Kirim Anak Nakal ke Barak Militer        | 9    | Positive  |  |

|       |   |          |         |
|-------|---|----------|---------|
| Title | Mensos: Saya Tidak Ada Minat Jadi Ketum PPP |          |         |
| Media | Investor Daily                              | Reporter | Is/ant  |
| Date  | 2025-05-16                                  | Tone     | Neutral |
| Page  | 12  | PR Value |         |

## Mensos: Saya Tidak Ada Minat Jadi Ketum PPP

**JAKARTA, ID** - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan tidak memiliki minat untuk Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) karena masih ingin fokus menuntaskan seluruh tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang menteri.

"Selalu saja saya disebut setiap Muktamar PPP, tapi saya terus terang, tidak ada minat, tidak ada keinginan. Saya ya nuntaskan tugas-tugas saya dulu," kata Mensos Saifullah usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kantor Kemensos Salemba,

Jakarta pada Kamis (15/5/2025).

Lebih lanjut, ia pun menjelaskan banyak nama lain yang lebih layak dan siap untuk masuk dalam bursa calon Ketua Umum PPP menjelang Muktamar PPP yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus-September 2025.

Ia mengaku masih mempunyai tanggung jawab dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Sementara itu, kader muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tergabung dalam Generasi Muda Pembangunan

Indonesia (GMPI) berharap para elit PPP di pusat maupun daerah terus menjaga soliditas jelang Muktamar yang akan digelar pada Agustus-September tahun ini.

"Pimpinan PPP yang di DPP, DPW hingga DPC diharapkan bisa menjaga soliditas sebelum digelar Muktamar tahun ini," kata Ketua Bidang Media dan Infokom Pimpinan Pusat GMPI M. Samsul Arifin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Samsul juga meminta para pengurus PPP untuk terus menjaga kekompakan dan fokus pada

satu tujuan yaitu memajukan partai. Dia juga meminta agar pimpinan PPP tidak larut dalam isu-isu yang bisa memecah-belah soliditas partai.

"Sudah saatnya semuanya kompak dan bersatu-padu untuk memajukan partai. Juga tidak sibuk dengan isu-isu yang tidak penting, apalagi sampai bisa memecah-belah partai," ujarnya.

Menurutnya, menjaga soliditas partai sejalan dengan prinsip dasar perjuangan PPP kelima, yaitu prinsip persamaan, kebersamaan dan persatuan.

Prinsip dasar perjuangan

ini memberikan motivasi kepada seluruh jajaran partai agar terhindar dari perpecahan yang membuat partai merosot.

Dikatakannya, dalam Muktamar mendatang diharapkan para elit PPP lebih mengedepankan prinsip dasar perjuangan PPP keempat. Dengan musyawarah bisa saling menghargai dan menumbuhkan tanggungjawab bersama, sehingga demokrasi dalam Muktamar bisa terwujud

Sebelumnya pada Rabu (15/5/2025), Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy mengatakan

dirinya mendorong adanya wajah baru atau tokoh dari luar partai untuk memimpin PPP.

Ia mengatakan dirinya sudah banyak mendengar nama-nama besar di luar PPP yang dikabarkan sebagai calon Ketua Umum PPP, diantaranya Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Dudung Abdurachman, Amran Sulaiman, Marzuki Alie, dan Agus Suparmanto.

Sementara dari internal PPP, ia hanya mendengar tiga nama besar yang muncul, yakni Sandi-aga Uno, Sekjen Arwani Thomafi dan Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin). **(Is/ant)**

|              |   |                 |          |
|--------------|---|-----------------|----------|
| <b>Title</b> | <b>Wagub: Jawa Tengah Tidak Kirim Anak Nakal ke Barak Militer</b> |                 |          |
| <b>Media</b> | Jateng Pos  | <b>Reporter</b> | Jan      |
| <b>Date</b>  | 2025-05-16  | <b>Tone</b>     | Positive |
| <b>Page</b>  | 12  | <b>PR Value</b> |          |

## Wagub: Jawa Tengah Tidak Kirim Anak Nakal ke Barak Militer

SEMARANG - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak akan menerapkan penegakan disiplin anak-anak nakal untuk dikirim ke barak militer sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Jawa Barat.

Menurutnya, kedisiplinan wajib diterapkan. Namun tidak harus dilakukan dengan memasukkan pelajar ke barak militer.

"Nggak lah, kita kan ada aturannya, kita bukan negara yang siap perang kok. Kita sudah tahu kedisiplinan itu wajib. Di Jawa Tengah punya sekolah yang bekerja sama dengan militer dan mereka dilatih di sekolah," beber Wagub usai menjadi Inspektur

pada Apel Kesiapsiagaan Satpol PP, Satuan Linmas, dan Satuan Damkar Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kamis (15/05/2025) di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Wagub menegaskan, yang paling utama bagi pelajar adalah ketertiban, kedisiplinan, dan paham bahwa mereka usia untuk belajar. "Itu yang paling utama," tegas Wagub.

Dikatakan, setiap daerah memiliki permasalahan sendiri - sendiri yang tidak sama satu sama lain. Jawa Tengah, mempunyai keakraban yang berbeda dengan masyarakat Jawa Timur ataupun Jawa Barat.

"Saya berharap tidak ada pembandingan-pembandingan, sama-sama menjalankan tugas yang

tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.

Penegasan ini menjawab pertanyaan masyarakat apakah penerapan pelajar masuk barak militer akan diterapkan juga di Jawa Tengah, sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi membuat kebijakan anak nakal dikirim ke barak Militer untuk dididik karakter kebaikan. Tentu saja anak yang memang diserahkan oleh orang tuanya karena sudah menyerah untuk mendidiknya.

Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra. Komnas HAM dan aktivis pendidikan menilai kebijakan itu tidak tepat karena melanggar

UU hak anak. Anak nakal bukan dikirim ke barak tetapi harus dididik di sekolah dan orang tuanya. Kebijakan ini juga dianggap sebagai program putus asa karena tidak punya cara mendidik anak yang benar.

Namun banyak juga yang setuju karena diharapkan anak bisa berubah. Pendidikan tegas ala Militer mampu merubah karakter anak yang sudah tidak bisa dibina oleh orang tuanya. Bahkan Menteri HAM RI Natalius Pigai mengapresiasi program ini. Jika bagus bukan tidak mungkin diadopsi oleh pemerintah pusat untuk menangani anak-anak yang bermasalah. (\*/jan)



Wagub Jateng Gus Yasin saat apel kesiapsiagaan Linmas Jateng. HUMAS/JATENGPOS

|              |  |                 |          |
|--------------|--|-----------------|----------|
| <b>Title</b> | <b>Jateng Tidak Akan Kirim Anak Nakal ke Barak Militer</b> |                 |          |
| <b>Media</b> | Suara Merdeka  | <b>Reporter</b> | ekd-45   |
| <b>Date</b>  | 2025-05-16   | <b>Tone</b>     | Positive |
| <b>Page</b>  | 9  | <b>PR Value</b> |          |

# Jateng Tidak Akan Kirim Anak Nakal ke Barak Militer

**SEMARANG** - Wagub Jateng, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) menegaskan, Pemprov Jateng tidak akan menerapkan penegakan disiplin anak-anak nakal untuk dikirim ke barak militer sebagaimana yang dilakukan Pemprov Jabar.

Menurutnya, kedisiplinan wajib diterapkan. Namun tidak harus dilakukan dengan memasukkan pelajar ke barak militer.

"Nggak lah, kita kan ada aturan-nya, kita bukan negara yang siap perang kok. Kita sudah tahu kedis-

plinan itu wajib. Di Jateng punya sekolah yang bekerja sama dengan militer dan mereka dilatih di sekolah," kata Wagub usai menjadi Inspektur pada Apel Kesiapsiagaan Satpol PP, Satuan Linmas, dan Satuan Damkar Tingkat Provinsi Jateng, Kamis (15/5) di Halaman Kantor Gubernur Jateng.

Wagub menegaskan, yang paling utama bagi pelajar adalah ketertiban, kedisiplinan, dan paham bahwa mereka usia untuk belajar.

"Itu yang paling utama," tegas Wagub. Dikatakan, setiap daerah memiliki permasalahan sendiri-sendiri yang tidak sama satu sama lain. Jateng, mempunyai keakraban yang berbeda dengan masyarakat Jatim ataupun Jabar.

## Tak Ada Pembandingan

"Saya berharap tidak ada pembandingan-pembandingan, sama-sama menjalankan tugas yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.

Penegasan itu menjawab pertanyaan masyarakat apakah penerapan pelajar masuk barak militer akan diterapkan juga di Jateng, sebagaimana yang dilakukan Pemprov Jabar.

Diketahui, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi membuat kebijakan anak nakal dikirim ke barak militer untuk dididik karakter kebaikan. Tentu saja anak yang memang diserahkan oleh orang tuanya karena sudah menyerahkan untuk mendidiknya.

Kebijakan itu menimbulkan pro dan kontra. Komnas HAM dan aktivis pendidikan menilai kebijakan itu tidak tepat karena melanggar UU hak anak.

Namun banyak juga yang setuju karena diharapkan anak bisa berubah. Pendidikan tegas ala militer mampu mengubah karakter anak yang sudah tidak bisa dibina oleh orang tuanya. Bahkan Menteri HAM RI Natalius Piga mengapresiasi program itu. (ekd-45)



SM/Eko Edi

**APEL KESIAPSIAGAAN :** Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin usai menjadi Inspektur pada Apel Kesiapsiagaan Satpol PP, Satuan Linmas, dan Satuan Damkar Tingkat Provinsi Jateng, Kamis (15/5) di Halaman Kantor Gubernur. (45)